



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2022

BENGKULU SELATAN

MINGGU, 27 MARET 2022

SUMBER BERITA

☒	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

☐ POSITIF ☒ NETRAL ☐ BAHAN PEMERIKSAAN ☐ PERHATIAN KHUSUS

TGR Rp 1,081 Miliar Rawan ke APH

KOTA MANNA - Tuntutan Ganti Rugi (TGR) temuan BPK RI di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) menyisakan Rp 1,081 miliar dari total TGR Rp 1,583 miliar. Sehingga besarnya TGR tersebut, Dikbud BS telah tiga kali mediasi dengan pihak kontraktor. Namun pihak kontraktor minta negosiasi diberi waktu

pelunasan TGR hingga Mei 2022.

Kepala Dikbud Kabupaten BS, Novianto S.Sos M.Si saat dikonfirmasi mengatakan, hingga saat ini pihak kontraktor atau rekanan baru menyelesaikan TGR sebesar Rp 500 juta per 26 Maret 2022. Masih tingginya TGR di Dikbud tersebut Novianto menegaskan kalau pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin agar TGR lunas sebelum batas 60 hari tindak lanjut temuan BPK RI.

Akan tetapi hingga batas waktu 60 hari lewat 21 Maret lalu, progres pelunasan TGR masih sangat minim. "Sudah tiga kali mediasi dengan pihak kontraktor. Dan pihak kontraktor minta negosiasi sampai bulan Mei 2022. Selasa 29 Maret kami dipanggil Inspektorat untuk rapat, mungkin untuk pemberitahuan tidak ada jeda lagi pada pihak kontraktor," kata Novianto.

Novianto sangat menyayangkan pihak rekanan yang belum melunasi TGR hingga 21 Maret lalu. Sehingga pihaknya juga bingung apa yang akan disampaikan dengan pihak Inspektorat apabila rapat 29 Maret nanti TGR belum lunas.

"Kalau kami Instansi teknis, sementara ada pihak Inspektorat, APIP. Kalau ingin menyerahkan kepada APH bukan porsi kami (Dikbud), yang jelas kami rapat dulu bersama Inspektorat," sampai Novianto.

Sementara itu Inspektur Inspektorat BS Hamdan Syarbaini S.Sos kembali menerangkan, batas waktu tindak lanjut TGR temuan BPK RI sudah berakhir 21 Maret lalu.

Akan tetapi, pihak Inspektorat masih memberikan kelonggaran untuk membayar TGR karena pihaknya akan menyampaikan laporan progres TGR ke BPK RI pada Senin (28/3) ini.

"Kalau harapannya sebelum tanggal 28 Maret sudah ada tindak lanjut atau TGR lunas," terang Hamdan.

Sedangkan apabila TGR belum lunas hingga batas waktu penyampaian LKPD, Inspektorat akan berkonsultasi ke BPK terkait tindak lanjut tersebut.

Bahkan Hamdan menuturkan, apabila TGR belum lunas pihaknya akan berkonsultasi dengan BPK RI. Dan apabila harus dilimpahkan ke APH, maka pihaknya siap dan tidak ada masalah.

"Harus ke APH, namun sebelumnya kami akan berkonsultasi dengan BPK dulu. Tapi sebagai ketegasan kami (Inspektorat) tidak masalah ke APH," sambungnya.

Dari 17 paket proyek penyumbang TGR di Dinas Dikbud, proyek rehab SMPN 2 BS menjadi penyumbang terbesar. TGR-nya nyaris setengah miliar rupiah atau sebesar Rp 467,502 juta dari total anggaran Rp 2,4 miliar. Progres penyelesaian pun sangat minim. Hingga kemarin baru dibayar Rp 25 juta oleh CV Martina Konstruksi selaku rekanan proyek tersebut, artinya masih tersisa sebesar Rp 442,502 juta.

Sementara itu pihak RB mencoba konfirmasi dengan pihak rekanan TGR, akan tetapi belum ada jawaban hingga berita ini terbitkan. (tek)